



**IHSAN BASIR, SH, LL.M**  
Pj. Bupati Banggai Kepulauan



**RLPPD** (Ringkasan Laporan  
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN  
2023**





## **RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam mempertanggungjawabkan tugasnya, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Presiden melalui Gubernur sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 70 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) memuat capaian makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah, dan inovasi daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas melalui media cetak maupun elektronik.

Salakan, Maret 2024

Pj. Bupati Banggai Kepulauan



**IHSAN BASIR, SH.,LL.M**





## 1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional khususnya Kabupaten Banggai Kepulauan.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Tahun 2022	Tahun 2023	Ket
1	Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,30	67,05	
2	Laju Penurunan Angka Kemiskinan	13,44	12,90	
3	Laju Penurunan Angka Pengangguran	1,48	1,56	
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,94	3,94	
5	Laju Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita	37,376	39,909	
6	Penurunan Tingkat Ketimpangan Pendapatan	0,280	0,272	

## 2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar adalah capaian kinerja pada 6 (enam) Urusan Pemerintahan (Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Sosial).

### Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh dinas Pendidikan dengan 3 (tiga) Indikator Pelayanan Dasar dan capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator	Sasaran Dalam Tahun	Target dalam tahun	Presentase
1.	<b>Pendidikan Anak Usia Dini :</b> Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan	4.845	4.635	95 %



	Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Penerima Layanan Dasar			
	a. Angka parsitipasi Sekolah	80	63	78.75%
	b. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	10	4	40 %
	c. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/D-IV	75	25	33.33%
	d. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	0	0	0%
	e. Kecukupan formasi guru ASN	0	0	0%
	f. Indeks distribusi guru	1	1	100%
	g. Proporsi PTK bersertifikat	5	2	40%
	h. Proporsi PTK penggerak			
	i. Pengalaman pelatihan guru	0 5	0 5	0% 100%
2.	<b>Pendidikan Dasar (SD) :</b> Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun Penerima Layanan Dasar <b>SD</b>	17.888	17.888	100%
	a. Angka parsitipasi Kasar	92	88	95.65%
	b. Angka Partisipasi Sekolah	90	89	98.89 %
	c. Angka Partisipasi Murni	85	85	100%
	d. Kemampuan Literasi	95	53	55.79%
	e. Kemampuan numerasi	90	41	45.56%
	f. Perbedaan Skor Literasi	5	5	100%
	g. Perbedan Skor numerasi	5	5	100%
	h. Indeks Iklim Keamanan	79	58	73.42%
	i. Indeks Iklim kebinekaan dan inklusivitas	80	46	57.50 %
	j. Kecukupan formasi Guru ASN	80	1	1.25%
	k. Indeks distribusi Guru	78	2	2.56%
	l. Proporsi PTK bersertifikat	75	60	80 %
	n. Proporsi PTK Penggerak			



	M.Pengalaman Pelatihan Guru	37	10	27%
	Guru	25	25	100%
	<b>SMP</b>			
	a. Angka parsitipasi Kasar	95	95	100%
	b. Angka Partisipasi Sekolah	90	90	100%
	c. Angka Partisipasi Murni	85	85	100%
	d. Kemampuan Literasi	94	94	100%
	e. Kemampuan numerasi	89	89	100%
	f. Perbedaan Skor Literasi	8	8	100%
	g. Perbedan Skor numerasi	6	6	100%
	h. Indeks Iklim Keamanan	80	80	100%
	i. Indeks Iklim kebinekaan dan inklusivitas	85	85	100%
	j. Kecukupan formasi Guru ASN	87	87	100%
	k. Indeks distribusi Guru	75	75	100%
	l. Proporsi PTK bersertifikat	76	76	100%
	n. Proporsi PTK Penggerak	30	30	100%
	M.Pengalaman Pelatihan Guru	45	45	100%
3.	<b>Pendidikan Kesetaraan :</b>			
	Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan	2.441	2.441	100%
	Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Penerima Layanan Dasar			
	a. Angka parsitipasi Kasar	65	65	100%
	b. Angka Partisipasi Sekolah	24	24	100%
	c. Angka Partisipasi Murni	30	30	100%
	d. Kemampuan Literasi	56	56	100%
	e. Kemampuan numerasi	12	12	100%
	f. Perbedaan Skor Literasi	9	9	100%
	g. Perbedan Skor numerasi	65	65	100%
	h. Indeks Iklim Keamanan	12	12	100%
	i. Indeks Iklim kebinekaan dan inklusivitas	35	35	100%
	j. Kecukupan formasi Guru ASN	25	25	100%
	k. Indeks distribusi Guru	35	35	100%



I. Proporsi PTK bersertifikat	20	20	100%
n. Proporsi PTK Penggerak	15	15	100%
M. Pengalaman Pelatihan Guru	5	5	100%

### Urusan kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh dinas Pendidikan dengan 12 (Dua belas) Indikator Pelayanan Dasar dan capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Persentase
1	2	3	4	5
1.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan swasta	2.334	1.987	81%
	a. Vaksin Tetanus Differi (Td)	2.334	1.985	81.55%
	b. Tablet tambah darah	2.334	1.985	81.55%
	c. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	2.334	1.985	81.55%
	d. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	2.334	1.985	81.55%
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	2.334	1.985	81.55%
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2.334	1.985	81.55%
	7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	2.334	1.985	81.55%
	8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2.334	1.985	81.55%
	9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	30	30	100%
	10 . Tenaga kesehatan : Bidan	329	329	100%
	11 . Tenaga kesehatan : Perawat	315	315	100%
	12 . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	2.434	1.436	100%
2.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di	2.324	1.728	74,48 %



	fasilitas kesehatan			
	a. Formulir Partograf	2.324	1.728	74.35%
	b. Kartu ibu (rekam medis)	2.324	1.728	74.35%
	c. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2.324	1.728	74.35%
	d. Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	30	30	100%
	e. Bidan	329	329	100%
	f. Perawat	315	315	100%
3.	Jumlah bayi yang baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	2.213	1.197	54 %
	a. Vaksin Hepatitis B0	2.213	1.197	54.09%
	b. Vitamin K1 injeksi	2.213	1.197	54.09%
	c. Salep/tetes mata antibiotik	2.213	1.197	54.09%
	d. Formulir bayi baru lahir	2.213	1.526	68.96%
	e. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	2.213	1.359	61.41%
	f. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2.213	1.526	68.96%
	g. Dokter/dokter spesialis Anak	30	30	100%
	h. Bidan	329	329	100%
	i. Perawat	35	35	100%
4.	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	10.487	5.427	52%
	a. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	10.487	5.427	51.75%
	b. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	10.487	4.662	44.46%
	c. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	10.487	9.837	93.80%
	d. Vitamin A Biru	10.487	745	7.10%
	e. Vitamin A Merah	10.487	5.715	54.50%
	f. Vaksin imunisasi dasar: HBO	10.487	5.715	54.50%
	g. Vaksin imunisasi dasar: BCG	10.487	5.715	54.50%
	h. Vaksin imunisasi dasar: Polio	10.487	5.715	54.50%
	i. Vaksin imunisasi dasar: IPV	10.487	5.715	54.50%
	j. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	10.487	5.715	54.50%
	k. Vaksin imunisasi dasar: Campak	10.487	5.715	54.50%
	l. Vaksin imunisasi dasar: Rubella	10.487	5.715	54.50%



	n. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB –Hib	10.487	5.715	54.50%
	o. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	10.487	5.715	54.50%
	p. 15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	10.487	5.715	54.50%
	q. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	010.487	5.715	54.50%
	r. Peralatan Anafilaktik	10.487	5.715	54.50%
	s. Tenaga kesehatan : Dokter	30	30	100%
	t. Tenaga kesehatan : Bidan	329	329	100%
	u. Tenaga kesehatan : Perawat	315	315	100%
	v. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	26	26	100%
	w. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	14	14	100%
	x. Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	14.684	14.684	100%
5.	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 mendapatkan skrining kesehatan	22.029	20.092	91%
	a. Buku raport kesehatanku	2.061	2.061	100%
	b. Buku pemantauan kesehatan	2.061	2.061	100%
	c. Kuesioner skrining kesehatan	2.061	2.061	100%
	d. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	2.061	2.061	100%
	e. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	2.061	2.061	100%
	f. Dokter/Dokter gigi	30	30	100%
	g. Bidan	329	329	100%
	h. Perawat	315	315	100%
	i. Ahli gizi	26	26	100%
	j. Tenaga Kesehatan masyarakat	97	97	100%
	k. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	40	40	100%
	l. Tenaga Non kesehatan : Guru	14.684	14.687	100%
6.	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	88.255	49.255	56 %
	a. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	88.255	49.355	55.83%
	b. Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut,	88.255	49.355	55.83%





	Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes			
	c. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	88.255	49.355	55.83%
	d. Dokter	30	30	100%
	e. Bidan	329	329	100%
	f. Perawat	315	315	100%
	g. Ahli Gizi	26	26	100%
	h. Tenaga Kesehatan Masyarakat	97	97	100%
	i. Tenaga nonKesehatan masyarakat	6	6	100%
7.	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	13.476	7.233	54% %
	a. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	13.476	7.233	53.67%
	b. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	13.476	7.233	53.67%
	c. Buku kesehatan lansia	13.476	7.233	53.67%
	d. Dokter	30	30	100%
	e. Bidan	329	329	100%
	f. Perawat	315	315	100%
	g. Ahli Gizi	26	26	100%
	h. Tenaga Kesehatan Masyarakat	97	97	100%
	i. Tenaga nonKesehatan	6	6	100%
8.	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	27.110	13.447	50%
	a. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)I	158	158	100%
	b. Tensimeter	158	158	100%
	c. Formulir pencatatan dan pelaporan	158	158	100%



	aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			
	d. Dokter	30	30	100%
	e. Bidan	329	329	100%
	f. Perawat	315	315	100%
	g. Tenaga Kesehatan Masyarakat	97	97	100%
	h. Obat Hipertensi	27.110	14.588	53.81%
9.	Jumlah penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	1.923	1.908	71.49 %
	a. Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	1.923	1.908	99.69%
	b. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1.923	1.908	99.69%
	c. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	1.923	1.908	99.69%
	d. Dokter	30	30	100%
	e. Bidan	329	329	100%
	f. Perawat	315	315	100%
	g. Ahli Gizi	26	26	100%
	h. Tenagakesehatan	97	97	100%
	i. Obat Diabetes Melitus	23.265	1.153	100%
10.	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	250	248	99 %
	a. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	250	248	99.20%
	b. Kit berisi 2 Alat Fiksasi	250	248	99.20%
	c. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	250	248	99.20%
	d. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	250	248	99.20%



	e. Dokter	10	10	100%
	f. Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	42	42	100%
	g. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	14	14	100%
11.	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.030	813	40.05 %
	a. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2.030	813	40.05 %
	b. Reagen Zn TB	2.030	813	40.05 %
	c. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	2.030	813	40.05 %
	d. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	2.030	813	40.05 %
	e. Catridge tes cepat molekuler	2.030	813	40.05 %
	f. Formulir pencatatan dan pelaporan	2.030	813	40.05 %
	g. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	2.030	813	40.05 %
	h. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	2	2	100%
	i. Perawat	315	315	100%
	j. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	2	2	100%
	k. Penata Rontgen	0	0	100%
	l. Tenaga kesehatan masyarakat	97	97	100%
	n. Tenaga non kesehatan terlatih	14	14	100%
12.	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di wilayah kerja dalam waktu satu tahun yang sama	3.211	2.756	86 %
	a. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	3.211	2.756	85.53%
	b. Tes cepat HIV (RDT) pertama	3.211	2.756	85.53%
	c. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	3.211	2.756	85.53%



d. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	3.211	2.756	85.53%
e. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	2	2	100%
f. Perawat	315	315	100%
g. Bidan	329	329	100%
h. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	42	42	100%
i. Tenaga kesehatan masyarakat	97	97	100%
j. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	14	14	100%

### Urusan Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan umum dilaksanakan oleh dinas Pekerjaan umum dengan 2 (Dua) Indikator Pelayanan Dasar capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	SASARAN	REALISASI	PRESENTASI
1.	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	121.684	108.765	89.38 %
	a. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	24.336	21.753	89.39%
	b. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	24.336	21.753	89.39
	c. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1.251	1.251	100%
	d. Jumlah rumah tangga yang	1.251	1.251	100%



	mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)			
2.	1. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domesti	121.684	117.035	96 %
	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	24.336	23.407	96.18%
	b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	24.336	23.407	96.18%
	c. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	24.336	5.367	22.05%
	d. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	850	750	88.24%
	e. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	0	0	0





### Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan umum dilaksanakan oleh dinas Pekerjaan umum dengan 2 (Dua) Indikator Pelayanan Dasar capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah	Persentase
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota</b>				
	a. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	<b>Tidak terjadi bencana</b>	0	0	0
	b. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		0	0	0
	c. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.		0	0	0
	d. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.		0	0	0
2.	<b>Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota</b>				
	a. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	<b>Tidak ada relokasi program pemerintah</b>	0	0	0
	b. Subsidi uang sewa		0	0	0
	c. Penyediaan rumah layak huni		0	0	0

### Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Pol PP dengan 7 (Tujuh) Indikator Pelayanan Dasar capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6



1.	Perelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum		120.142	120.142	100%
-	a. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)		20	20	100%
	b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)		2	2	100%
	c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)		160	160	100%
	d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)		2	2	100%
	e. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)		4	4	100%
	f. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan		4	4	100%



	Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)				
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.		8	8	100%
-	a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)		15	15	100%
	b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)		3	3	100%
	c. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)		2	2	100%
	d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)		7	7	100%
	e. Pelayanan pemadaman,		2	2	100%



	penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)				
f.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)		10	10	100%

**Sub urusan Bencana (Ketentraman dan Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat)**

Penyelenggaraan Urusan Bencana dengan 3 (Tiga) Indikator Pelayanan Dasar capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Realisasi	Persentasi
1.	Pelayanan informasi rawan bencana				
	1. Jumlah Warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana		120.142	120.142	100%
	a. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana		1	0	0%
	b. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana		120.142	1376	1.15%
	c. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana		1	1	100%
	d. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana		100	0	0%



2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		120.142	120.142	100%
	a. Sarana prasarana penanggulangan bencana		68	68	100%
	b. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)		30	30	100%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		120.142	142.142	100%
	a. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana		2	2	100%
	b. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana		1.376	1.376	100%
	c. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana		2	2	100%
	d. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas		0	0	0%
	e. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana		3	3	100%

### Urusan Sosial

Penyelenggaraan Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan 5(Lima) Indikator Pelayanan Dasar capaian kinerja sebagai berikut:

NO	Jenis pelayanan dasar	Sasaran Dalam Tahun	Realisasi Dalam Tahun	Persentase
----	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------





1	2	3	4	5
	1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	107	107	100 %
	a. Layanan data dan pengaduan	0	0	0%
	b. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	0	0	0%
	c. Penyediaan permakanan	25	25	100%
	d. Penyediaan sandang	25	25	100%
	e. Penyediaan alat bantu	5	5	100%
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	0	0	0%
1.	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	40	40	100%
	j. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0%
	k. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	12	12	100%
	l. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0%
	1. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	299	299	100%
	a. Layanan data dan pengaduan	0	0	0%
	b. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	0	0	0%
2.	b. Penyediaan permakanan	299	299	100%
	c. Penyediaan sandang	299	299	100%
	e. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	0	0	0%
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0%
	g. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak	0	0	0%



	Terlantar			
	h. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0%
	i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	0	0	0%
	j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0%
	1. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	391	391	100%
	a. Layanan data dan pengaduan	0	0	0%
	b. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0%
	c. Penyediaan permakanan	100	100	100%
	d. Penyediaan sandang	100	100	100%
	e. Penyediaan alat bantu	0	0	0%
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0%
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	120	120	100%
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	0	0	0%
	i. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	71	71	100%
	j. Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	0	0	0%
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga			
3.				
4.	1. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di	0	0	0%



luar Panti Sosial				
<b>Tidak ada rehabilitasi</b>				
a. Layanan data dan pengaduan	0	0	0%	
b. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0%	
c. Penyediaan permakanan	0	0	0%	
d. Penyediaan sandang	0	0	0%	
e. Penyediaan alat bantu	0	0	0%	
f. Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0%	
g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	0	0	0%	
h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	0	0	0%	
i. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	0	0	0%	
j. Akses ke layanan pendidikan	0	0	0%	
k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0%	
l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0%	
n. Layanan rujukan	0	0	0%	
o. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0%	
p. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu	0	0	0%	



	melakukan pengadaan kendaraan baru			
5.	1. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	150	150	99,98%
	a. Penyediaan permakanaan	150	150	100%
	b. Penyediaan sandang	0	0	0%
	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	0	0	0%
	d. Pelayanan dukungan Psikososial	0	0	0%

### 3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN

Hasil EPPD Atas LPPD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan

- a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2021 dengan status penilaian rendah.
- b. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 dengan status penilaian rendah.

#### **Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022 Kabupaten Banggai Kepulauan Mendapatkan Penilaian WDP
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2023 Kabupaten Banggai Kepulauan dalam proses pemeriksaan.

### 4. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022, yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan 31 Oktober 2023.



Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

Target Pendapatan	Rp. 860.045.753.599,00
Realisasi Pendapatan	Rp. 822.401.057.768,30,00
Selisih	Rp. 37.644.695.830,70

Realisasi Pendapatan mencapai 95,62 % dari target pendapatan Tahun 2023.

Perubahan terhadap Proyeksi Pendapatan Daerah tersebut berasal dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni sebesar Rp. 41.060.725.094 (*Empat puluh satu milyar enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Sembilan puluh empat rupiah*) meningkat Rp.1.641.191.445 (*Satu milyar enam ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah*) dari target sebelumnya yakni sebesar Rp.39.419.533.649 (*Tiga puluh Sembilan milyar empat ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*) dan Peningkatan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 43.701.329.165 (*Empat puluh tiga milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah*) dari semula Rp 771.306.476.492 (*Tujuh ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*) menjadi Rp.815.007.805.657 (*Delapan ratus lima belas milyar tujuh juta delapan ratus lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah*) tetapi menurun pada sektor Lain lain Pendapatan yang sah yaitu sebesar Rp.3.977.222.848 (*Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*) menurun sebesar Rp.1.682.108.136 (*Satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah*) dari target sebelumnya Rp. 5.659.330.984 (*Lima milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*).

#### Target dan Realisasi Pendapatan

No	Jenis Belanja	Anggaran Tahun 2023	Realisasi	Selisih	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>624.319.448.894,00</b>	<b>499.847.157.806,00</b>	<b>124.472.291.088,00</b>	80,06
	Belanja Pegawai	373.972.907.406,00	333.085.890.632,00	40.887.016.774,00	89,07





	Belanja Barang dan Jasa	213.350.782.625,00	189.483.973.561,00	23.866.809.064,00	88,81
	Belanja Hibah	33.016.621.863,00	18.466.692.404,00	14.549.929.459,00	55,93
	Belanja Bantuan Sosial	3.979.137.000,00	3.863.773.000,00	115.364.000,00	97,1
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>151.052.856.292,00</b>	<b>135.514.050.048,00</b>	<b>15.538.806.244,00</b>	89,71
	Belanja Modal Tanah	4.551.020.000,00	3.418.849.908,00	1.132.170.092,00	75,12
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.992.755.382,00	15.457.854.075,00	2.534.901.307,00	85,91
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.196.411.022,00	56.180.506.865,00	5.015.904.157,00	91,8
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	67.176.212.100,00	60.393.603.200,00	6.782.608.900,00	89,9
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	136.457.788,00	63.236.000,00	73.221.788,00	46,34
3	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>1.191.363.962,00</b>	<b>1.105.880.000,00</b>	<b>85.483.962,00</b>	92,82
	Belanja Tidak Terduga	1.191.363.962	1.105.880.000,00	85.483.962	92,82
4.	<b>Belanja Transfer</b>	<b>160.373.599.664</b>	<b>163.604.370.514,00</b>	<b>3.230.770.850</b>	102,01
	Belanja Bagi Hasil	3.160.953.364,00	2.487.581.214,00	673.372.150,00	78,7
	Belanja Bantuan Keuangan	157.212.646.300,00	161.116.789.300,00	3.904.143.000,00	102,48
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>936.937.268.812,00</b>	<b>800.071.458.368,00</b>	<b>136.865.810.444,00</b>	85,39

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD perubahan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.136.865.810.444,00 (*Seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh empat*) atau 14,60% dari Rp.936.937.268.812,00 (*Sembilan ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua*) menjadi Rp.936.937.268.812,00 (*Sembilan ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah*)



Belanja Operasi berkurang sebesar Rp.124.472.291.088,00 (*Seratus dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah*) atau berkurang 19,93% dari target sebelumnya yaitu Rp.624.319.448.894,00 (*Enam ratus dua puluh empat milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah*) terealisasi sebesar Rp.499.847.157.806,00 (*Empat ratus sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam*).

Pada Belanja Modal turun 10,28% atau berkurang sebesar Rp.15.538.806.244,00 (*Lima belas milyar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*) dari target sebesar Rp.151.052.856.292,00 (*Seratus lima puluh satu milyar lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah*) terealisasi sebesar Rp.135.514.050.048,00 (*Seratus tiga puluh lima milyar lima ratus empat belas juta lima puluh ribu empat puluh delapan rupiah*).

Selanjutnya pada Belanja Tak Terduga dari target yang telah ditetapkan yakni Rp.1.191.363.962,00 (*Satu milyar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*) menurun 7,17% dengan realisasi sebesar Rp.1.105.880.000,00 (*Satu milyar seratus lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Pada Belanja Transfer dari target yang telah ditetapkan yakni Rp.160.373.599.664,00 (*Seratus enam puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat*) meningkat 2,01% dengan realisasi menjadi Rp.163.604.370.514,00 (*Seratus enam puluh tiga milyar enam ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat belas rupiah*)

## 5. INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah yang berhasil dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Maupun Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2023 sebagai berikut ini:

### **Adanya Inovasi Secara Kualitas Dan Kuantitas**

#### **❖ Orang tua asuh stunting**

(Pelibatan masing-masing perangkat daerah dalam intervensi kasus stunting dengan mengangkat 1 (satu) anak stunting untuk di intervensi)



❖ **JUS**

(Akronim dari jumat untuk sedekah merupakan kegiatan dimana setiap jumat dilakukan sedekah untuk keluarga yang terdapat kasus stunting)

❖ **Forum anak**

(Adalah sebuah forum yang dibentuk sebagai pelapor dan pelopor pencegahan perkawinan dibawah umur)

❖ **Malane mola**

(Malane mola yang dalam bahasa banggai berarti **laki-laki bisa** memiliki makna bahwa peran bapak dalam tumbuh kembang anak sangat diperlukan)

❖ **Subuh berjamaah**

(Merupakan kegiatan unggulan dimana setiap pns, pppk maupun tenagakontrak diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah)

❖ **Program gereja dan masjid ramah anak**

❖ **Safari jumat**

❖ **KKN cegah stunting**

(Inovasi dimana perguruan tinggi yang akan melaksanakan kkn di wilayah banggai kepulauan diarahkan tematiknya pada penurunan angka stunting)

❖ **Kios stunting**

❖ **PKK cegah stunting**

(Merupakan pelibatan pkk dalam penanganan stunting dengan ibu-ibu pkk yang sebelumnya telah dibekali pengetahuan melalui pelatihan penanganan stunting).